

BAB VIII

KONDISI PEREKONOMIAN



Salah satu implikasi adanya otonomi daerah adalah daerah memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya baik itu dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun dari sisi pembiayaan pembangunan. Salah satu aspek pembangunan yang mendasar dan strategis adalah pembangunan aspek ekonomi, baik pembangunan ekonomi pada tatanan mikro maupun makro. Secara mikro, pembangunan ekonomi lebih menekankan pada pembangunan individu, kelompok maupun golongan, akan tetapi pembangunan ekonomi makro sebagaimana di Kabupaten Jember didasarkan pada beberapa penekanan seperti pencapaian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan investasi.

Sebagai komponen ekonomi makro, maka keberadaan PDRB, APBD, PAD dan investasi seringkali menjadi komoditas politik. Kendatipun hal tersebut di Kabupaten Jember masih berkembang dalam batas-batas normatif.



8.1. Keuangan Daerah

8.1.1. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Kemudian Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan APBD seluruh pendapatan daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

- a) Pendapatan Daerah
- b) Belanja Daerah
- c) Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus



3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah.





Tabel 8. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jemberana 2007 - 2011

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
A.	Pendapatan Asli Daerah	16.975.878.104,12	21.235.505.863,05	33.952.879.718,41	41.994.591.088,90	41.330.605.674,41
1.	Pajak Daerah	3.982.690.076,64	3.867.573.849,25	4.384.491.273,00	5.294.407.262,00	9.000.786.813,25
2.	Retribusi Daerah	6.254.688.030,00	7.840.165.186,28	16.882.015.659,58	8.129.803.867,29	4.521.869.727,33
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.378.637.069,40	1.775.835.485,09	2.039.752.869,15	2.305.409.239,69	2.602.468.852,94
4.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.359.862.928,08	7.751.931.342,43	10.646.619.916,68	26.264.970.719,92	25.205.480.280,89
B.	Dana Perimbangan	340.897.722.906,00	377.967.921.731,00	384.853.878.416,00	371.898.146.572,00	426.572.101.884,00
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	19.617.722.906,00	23.768.285.731,00	26.594.057.416,00	28.610.314.572,00	21.668.027.144,00
2.	Dana Alokasi Umum	278.583.000.000,00	304.078.636.000,00	306.361.821.000,00	308.567.032.000,00	339.501.986.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	42.697.000.000,00	50.121.000.000,00	51.898.000.000,00	34.720.800.000,00	35.488.400.000,00
C.	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.182.195.136,91	55.728.641.216,90	58.708.735.551,76	75.090.137.846,09	100.358.626.965,28
1.	Hibah	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	-



3.	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.932.590.221,41	26.208.624.000,00	39.587.223.000,00	40.888.836.526,48	66.498.751.965,28
4.	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	604.040.904,00	4.429.805.763,00	6.082.350.000,00	28.413.200.400,00	32.073.035.000,00
5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.645.564.011,50	22.090.211.453,90	12.769.162.551,76	5.788.100.919,61	-
6.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Total Pendapatan	407.055.796.147,03	454.932.068.810,95	477.515.493.686,17	488.982.875.506,99	8.604.783.067,72

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jember



2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan atau urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Belanja Kabupaten Jemberana untuk tahun anggaran 2008 – 2010 dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Tabel 8. 2 Realisasi Belanja Daerah Kab. Jemberana Tahun 2008 - 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Belanja Tidak Langsung	268.786.068.638,00	297.047.882.978,95	347.243.048.402,66	358.848.475.424,76
2	Belanja Langsung	176.485.478.535,00	182.086.926.139,76	149.064.728.314,75	188.703.952.191,40
	Total	445.271.547.173,00	479.134.809.118,71	496.307.776.717,41	546.848.475.424,76

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jemberana



3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran.

Berikut adalah tabel realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008 – 2011 sebagai berikut :

Tabel 8. 3 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2008 – 2011

No	Uraian	Tahun			
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp.) *
1	Pendapatan Daerah	454,932,068,810.95	477,515,493,686.17	488,984,315,567.71	567,458,337,309.45
2	Belanja Daerah	445,271,547,173.00	479,134,809.12	496,307,776,717.41	546,856,657,048.76
3	Pembiayaan Daerah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	63,194,541,382.44	55,871,080,232.74
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	53.265.369.227,03	65,906,206,814.98	55,871,080,232.74	76,483,102,369.43

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jember

8.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Sebagai cerminan total nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, adalah PDRB yang memegang peran penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ditandai adanya perubahan atau pergeseran dalam kontribusi sektor ekonomi terhadap produk daerah sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri (sekunder), kemudian ke



arah sektor jasa-jasa (tersier). Hal ini sesuatu yang sangat wajar dan biasa terjadi di daerah yang sedang membangun dan berkembang seperti Kabupaten Jember.

Pergeseran atau transformasi sektor ekonomi telah membawa berbagai implikasi. Salah satu implikasi tersebut adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB di Kabupaten Jember merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan pembentukannya dipengaruhi oleh berbagai variabel. PDRB dapat dilihat dari dua sisi yaitu; PDRB atas dasar harga konstan yang perhitungannya dari jumlah produk yang dihasilkan setiap tahun dan dikalikan dengan harga tahun dasar. Dari sisi lain, besarnya PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat setiap tahun dikalikan dengan perubahan harga setiap tahun.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa PDRB merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi makro. Dalam kaitan dengan hal tersebut berikut ini disajikan perkembangan PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga berlaku dari tahun 2007-2011 seperti tabel berikut ini.

Tabel 8. 4 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011

Lapangan usaha	Tahun (Jutaan)					% kenaikan
	2007	2008	2009	2010	2011*)	
1. Pertanian	669.535,62	753.355,40	857.113,42	903.027,21	1.045.290,00	15,75
2. Penggalian	12.297,36	14.236,99	15.849,51	17.685,84	20.000,00	13,08
3. Industri	173.226,42	211.185,16	244.703,82	280.344,61	323.050,00	15,23
4. Listrik dan Air Minum	38.626,42	46.479,57	54.449,25	62.017,73	73.110,00	17,88
5. Bangunan	144.732,49	178.073,18	211.532,26	237.085,91	273.840,00	15,50
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	616.909,85	704.045,71	802.114,91	899.558,40	948.210,00	5,41
7. Pengangkutan, Komunikasi	383.709,19	473.999,84	528.851,81	582.575,18	628.740,00	7,92
8. Perbankan/Keuangan	116.993,11	136.040,37	158.883,19	175.114,91	206.120,00	17,71
9. Jasa-jasa	319.310,72	369.242,58	403.766,27	446.728,59	520.680,00	16,55

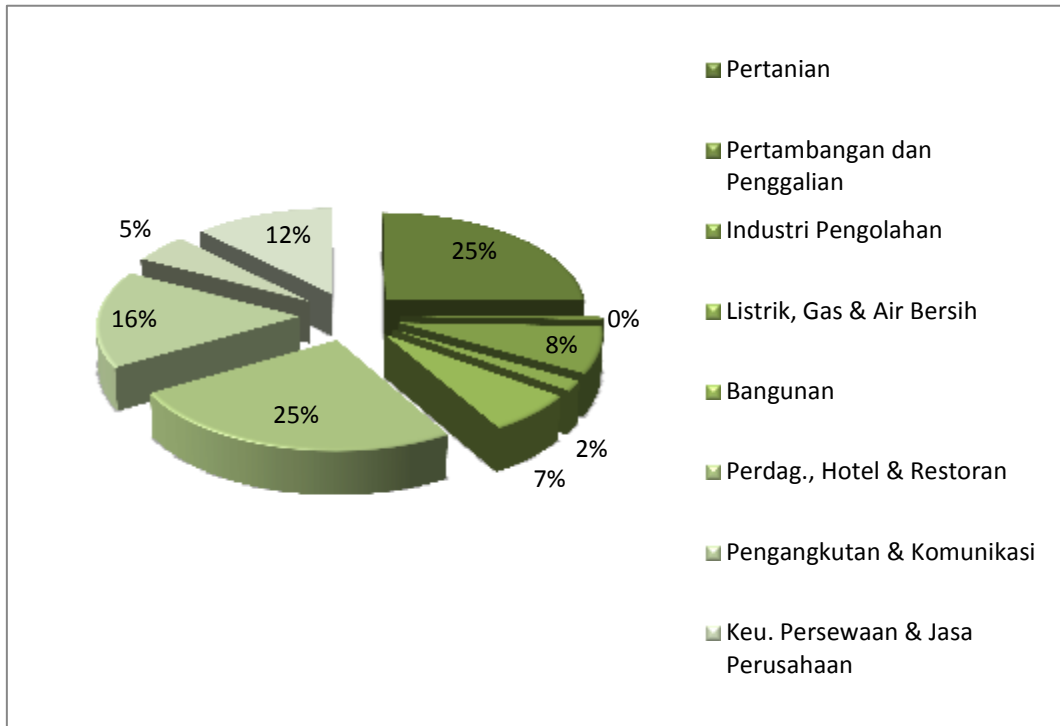
Sumber : BPS Kabupaten Jember Tahun 2012

* Angka Sementara

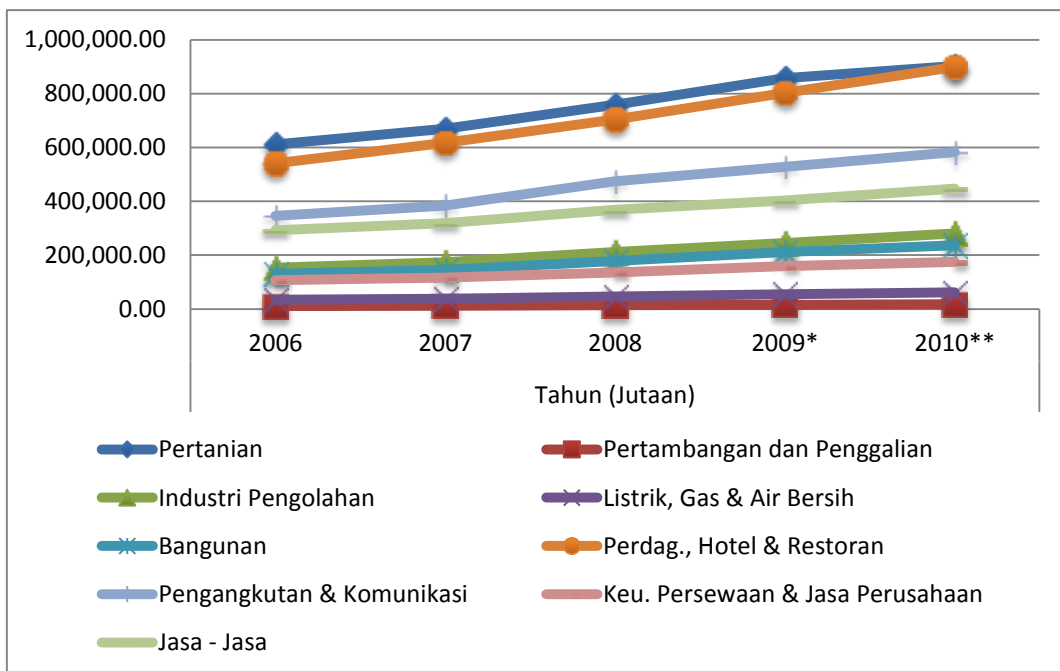
Berdasarkan tabel di atas, bahwa kontribusi di bidang pertanian masih dominan disusul bidang perdagangan, hotel dan restoran serta bidang pengangkutan dan komunikasi, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB di Kabupaten Jember setiap tahun mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah peningkatan jumlah produksi



(barang dan jasa) yang dihasilkan oleh lapangan usaha serta peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi setiap tahun. Untuk lebih jelasnya, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2011 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 8. 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku



Gambar 8. 2 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku



Selanjutnya perkembangan PDRB di Kabupaten Jemberna atas dasar harga konstan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 8.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jemberna Tahun 2007 – 2011

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp)
2007	1.510.512,67	2.475.347,22
2008	1.586.805,71	2.891.658,80
2009	1.663.345,44	3.277.309,44
2010	1.739.283,69	3.602.938,38
2011	1.836.772,38	3.932.270,96

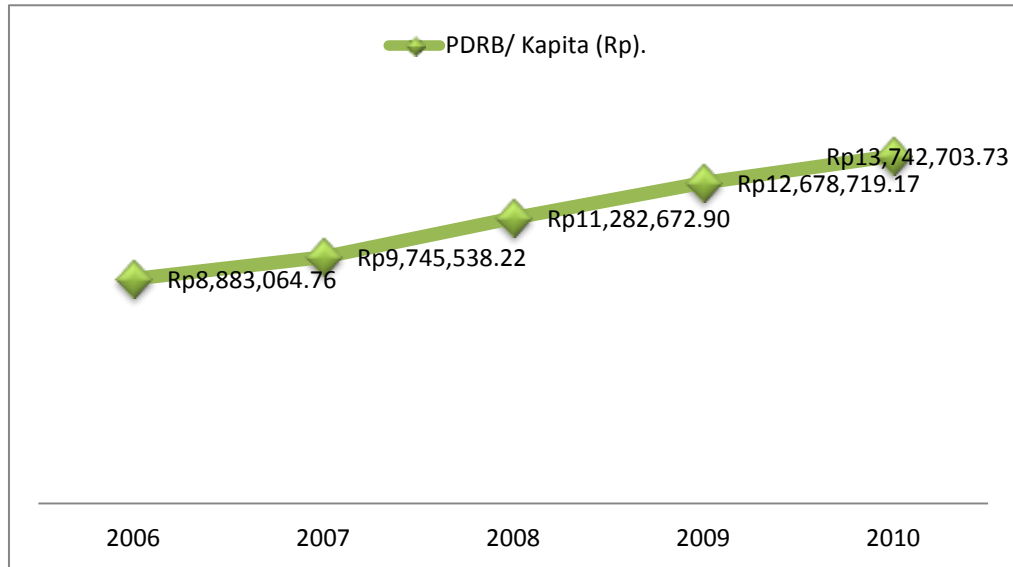
Sumber: Data BPS Kabupaten Jemberna Tahun 2012

Bila dilihat perkembangan masing-masing lapangan usaha dari tahun 2007-2011 di Kabupaten Jemberna, juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah produk yang dihasilkan setiap tahun oleh masyarakat di Kabupaten Jemberna dikalikan dengan harga tahun dasar. Bila dilihat dari perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Jemberna setiap tahun selalu meningkat. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi bersamaan dengan peningkatan pendapatan per kapita, pemerintah memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat sehingga turut serta mendorong kesejahteraan.

Tabel 8. 6 Perkembangan PDRB/ Kapita Atas Dasar Harga Konstan, PDRB/ Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007 s/d 2011

No.	Tahun	PDRB/ Kapita (Rp). Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB/ Kapita (Rp). Atas Dasar Harga Konstan
1.	2007	Rp 9.745.538,22	Rp 5.946.947,12
2.	2008	Rp 11.282.672,90	Rp 6.191.397,70
3.	2009	Rp 12.678.719,17	Rp 6.434.879,01
4.	2010	Rp 13.742.703,73	Rp 6.634.157,46
5.	2011	Rp 14.889.720,50	Rp 6.955.021,07

Sumber :BPS Kab. Jemberna, 2012



Gambar 8. 3 Perkembangan PDRB/ Kapita (Rp). Tahun 2007 s/d 2011

8.1.3. Realisasi Investasi dari PMDN dan PMA

Relisasi investasi di Kabupaten Jembrana berasal dari Alokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMA hanya tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Bali, sedangkan untuk PMDN tercatat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah & Penanaman Modal Kabupaten Jembrana.

Tabel 8.7 Realisasi Sumber Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana

No.	Jenis Investasi	Tahun					Total
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	9.505.936	3.640.000	22.091.706	-	-	37.967.102
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)						
	▪ Tercatat pada BPMD Propinsi	3.100.000	-	-	-	-	3.100.000
	▪ Tercatat pada Penanaman Modal Kabupaten	62.742.599	53.603.997	41.674.820	74.642.391.834	142.363.955.925,80	202.166.636

Sumber :Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu



8.2. Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

Sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Jember. Apabila dikelola dengan baik, hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut, yang terdiri dari potensi laut dan darat akan dapat dijadikan komoditas ekspor ke luar daerah sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Beberapa komoditas yang banyak dikenal dan dihasilkan di Kabupaten Jember tersebut beberapa adalah produksi kakao dan ikan laut, Sektor tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindagkop mampu menyerap tenaga kerja yang semakin bertambah setiap tahunnya.

Tabel 8. 8 Jumlah Pedagang dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember

No.	Tahun	Jumlah Pedagang		Penyerapan Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1.	2007	4.328	6.285	7.395	8.598
2.	2008	4.536	6.504	8.075	9.011
3.	2009	4.720	6.727	16.067	10.568
4.	2010	4.877	6.770	16.544	18.198

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi Kab. Jember

Untuk menunjang sektor perdagangan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan dukungan dari sektor industri dan kerajinan. Dengan adanya sektor tersebut, maka nilai ekonomi suatu barang akan semakin meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Jember, yang dapat dijadikan sebagai bahan mentah, menjadikan sektor industri dan kerajinan memiliki prospek untuk dikembangkan. Berdasarkan data dari Dinas Perindagkop, jenis industri di Kabupaten Jember yang terdiri dari 6 (enam) jenis mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Tabel 8. 9 Perkembangan Industri dan Kerajinan di Kabupaten Jembrana

No.	Jenis Industri	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	KLP. Pangan	626	881	936	865	960
2.	Industri Aneka	910	1.154	1.223	1.257	1.562
3.	Tenun	2.028	1.906	1.907	1.907	2.692
4.	KLP. Logam	38	39	48	51	119
5.	KLP. Industri Kayu	120	120	151	174	380
6.	KLP. Bahan Bangunan	1.627	1.275	1.318	1.334	160

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi Kab. Jembrana

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini, apabila dilihat perkembangan jumlah koperasi dan anggota setiap tahunnya di Kabupaten Jembrana selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa jenis usaha koperasi di Kabupaten Jembrana masih diminati oleh masyarakat.

Tabel 8. 10 Data Koperasi di Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Koperasi	Unit	198	201	214	218	222
2	Jumlah Anggota	Anggota	45.308	45.328	46.448	46.570	48.049
3	Koperasi Aktif	Unit	184	187	199	203	207
4	Koperasi Tidak Aktif	Unit	14	14	15	15	15

Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana



8.3. Pertumbuhan Ekonomi

8.3.1. Laju Inflasi

Perhitungan laju inflasi hanya dilakukan di BPS Provinsi Bali, sehingga untuk mengetahui angka inflasi di Kabupaten Jembrana menggunakan acuan perhitungan angka inflasi di kota terdekat, yaitu Kota Denpasar. Selain dilakukan di Kota Denpasar, perhitungan angka inflasi tersebut dilaksanakan di 66 kota di Indonesia yang secara periodik diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Data perkembangan inflasi tahun 2007-2011 sebagai berikut :

Tabel 8. 11 Perkembangan Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2007 s/d 2011

<i>Inflasi</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Juli	5.91	9.62	4.37	8.10	3.75

Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pada bulan Mei 2012 di Kota Denpasar terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2012 sebesar 2,21 persen dan laju inflasi "Year on Year" (Mei 2012 terhadap Mei 2011) sebesar 4,74 persen.

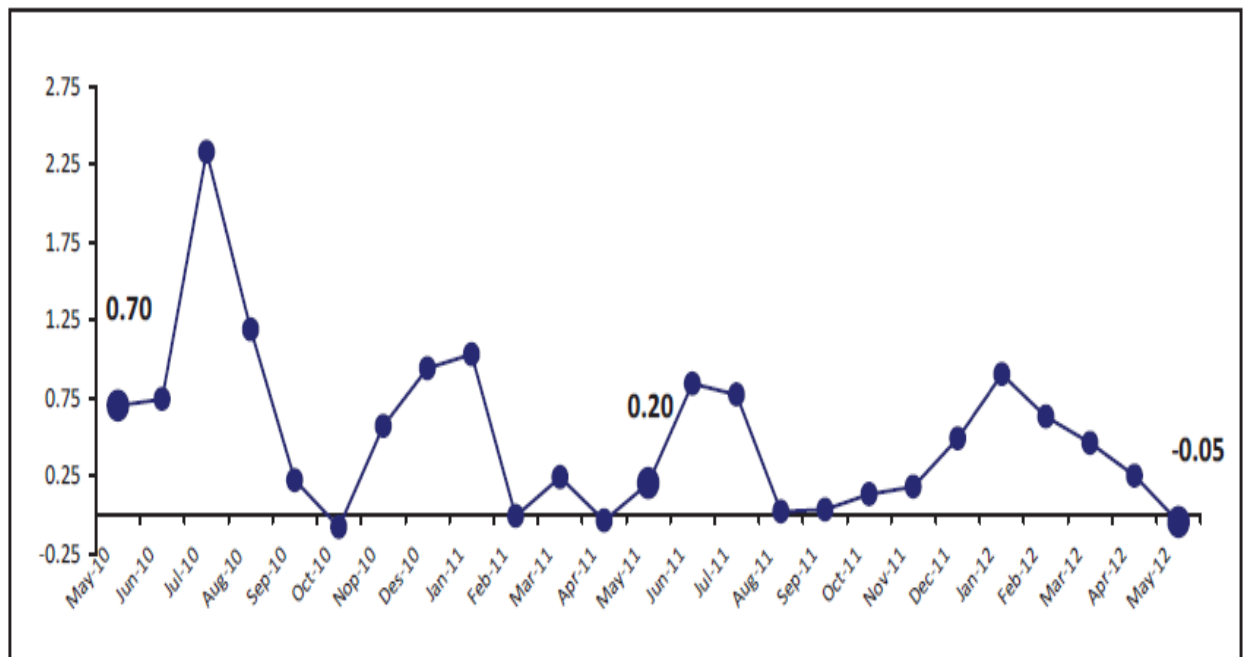
Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok barang dan jasa sebagai berikut: kelompok bahan makanan 0,89 persen; kelompok sandang 0,16 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,08 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau 0,50 persen; kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,06 persen; serta kelompok kesehatan 0,03 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain: cabe rawit, bawang putih, bayam, ikan cakalang, dan batu bata.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Mei 2012 antara lain: angkutan udara, tarif sewa rumah, pepaya, ikan jangki, gula pasir, dan daging ayam ras.



Pada bulan Mei 2012 kelompok-kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi adalah kelompok bahan makanan 0,2102 persen; kelompok sandang 0,0063 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,0048 persen. Sedangkan kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau 0,0828 persen; kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,0685 persen.



Gambar 8. 4 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Mei 2010 – Mei 2012

8.3.2. Indeks Gini

Gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk, untuk melihat karakteristik ketimpangan lainnya dapat menggunakan data PDRB perkapita sebagai proxy pendapatan per kapita. Indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

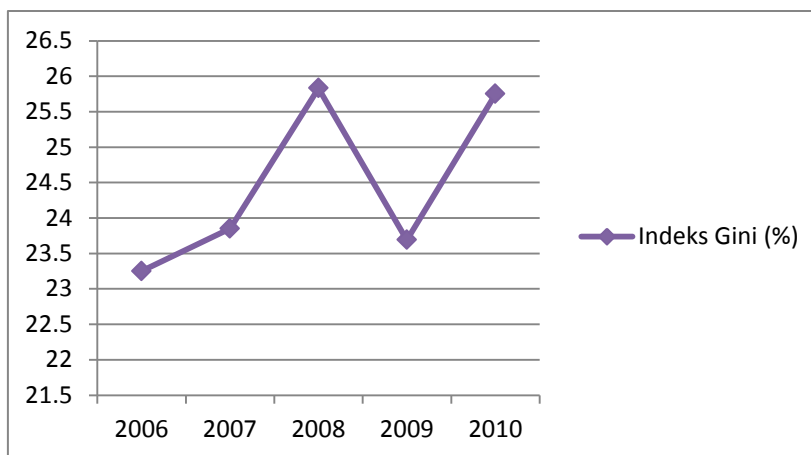


Tabel 8. 12 Indeks Gini Kabupaten Jembrana Tahun 2007 s/d 2010

No.	Tahun	Indeks Gini (%)
1.	2007	23,85
2.	2008	25,88
3.	2009	23,69
4.	2010	25,75

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana

Angka ketimpangan (gini ratio) di Kabupaten Jembrana masih berada pada katagori rendah, namun angkanya masih cenderung berfluktuasi meskipun hanya sedikit mengalami perubahan. Berdasarkan data selama lima tahun terakhir angka gini ratio Kabupaten Jembrana berada pada kisaran 23,25 % sampai 25,83 % atau berada pada kategori ketimpangan rendah.



Gambar 8. 5 Indeks Gini Kabupaten Jembrana Tahun 2007 s/d 2010

8.4. NTP (Farmers Term Of Trade)

NTP (Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.



Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada bulan Mei 2012, NTP Bali meningkat bila dibandingkan dengan bulan April 2012 sebesar 0,41 persen dari 107,54 menjadi 107,97. Secara umum kenaikan NTP ini disebabkan oleh kenaikan nilai indeks yang diterima petani yaitu sebesar 0,53 persen lebih besar dari kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,12 persen. Kenaikan indeks yang diterima petani ini dipicu oleh naiknya indeks yang diterima petani pada Subsektor Tanaman Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan.

Tabel 8. 13 Nilai Tukar Petani Bali Per Subsektor dan Perubahannya Mei 2012

No.	Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
		April 2012	Mei 2012	
1.	Tanaman Pangan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	127,41	127,34	-0,05
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	134,02	134,20	0,14
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	95,07	94,83	-0,19
2.	Hortikultura			
	a. Indeks yang Diterima (It)	195,57	198,55	1,47
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	132,09	132,22	0,10
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	148,13	150,15	1,37
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat			
	a. Indeks yang Diterima (It)	146,30	149,00	0,47
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	132,21	132,38	0,13
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	112,17	112,55	0,34
4.	Peternakan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	123,20	123,39	0,15
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	134,11	134,25	0,10
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	91,85	91,91	0,05
5.	Perikanan			
	a. Indeks yang Diterima (It)	113,10	113,13	0,03
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	132,22	132,37	0,11
	c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	85,54	85,46	-0,08
	Provinsi Bali			
	a. Indeks yang Diterima (It)	143,32	144,07	0,83
	b. Indeks yang Dibayar (Ib)	133,28	133,43	0,12
	c. Nilai Tukar Petani (NTP)	107,54	107,97	0,41

Sumber : BPS Propinsi Bali



Perbandingan NTP Mei 2012 terhadap April 2012 menunjukkan bahwa tiga subsektor mengalami kenaikan NTP. Subsektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah Subsektor Hortikultura, kemudian diikuti oleh Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Subsektor Peternakan. Sedangkan Sub sektor yang mengalami penurunan yaitu Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Perikanan.

8.5. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Provinsi Bali Tahun 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali No 113 tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 untuk Kabupaten Jembrana telah ditetapkan. Setiap tahun nilai mengalami kenaikan yang cukup berarti. Data perkembangan upah minimum seperti pada tabel berikut :

Tabel 8. 14 Data Upah Minimum Kabupaten Jembrana 2007-2012

Tahun	Upah Minimum Kabupaten	Pertumbuhan
2007	675.000	21,08
2008	737.500	9,26
2009	812.500	9,23
2010	875000	7,14
2011	927500	5,66
2012	1.000.000	7,25

Hasil analisa

Pengeluaran per kapita riil mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2007 pengeluaran per kapita riil adalah Rp 632.030,00 ; tahun 2008 menurun menjadi Rp 631.430,00 ; tahun 2009 menurun menjadi Rp 828.680,00 dan tahun 2009 kembali turun menjadi Rp 624.840,00. Sedangkan daya beli masyarakat pada tahun 2011 adalah Rp 633.500,00.



8.6. Bank dan LPD

Usaha perekonomian harus didukung dengan adanya sistem keuangan perbankan yang memadai. Dimana bank berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan baik untuk menyimpan, meminjam dana dan juga berguna untuk mendukung transaksi perekonomian dalam hal pembayaran. Bank juga berfungsi menyalurkan kredit dalam membantu masyarakat menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Disamping Bank Umum komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdapat pula Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan salah satu lembaga pengelola dana non bank diharapkan dapat menggerakkan perekonomian secara optimal apalagi di Kabupaten Jember hampir di setiap desa pekraman sekarang sudah berdiri LPD. Jumlah LPD di Kabupaten Jember saat ini sebanyak 64 buah.

Tabel 8. 15 Lembaga Keuangan Di Kabupaten Jember Tahun 2011

No.	Nama Lembaga Keuangan	Jumlah	Keterangan
1	Bank Umum	10	
2	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	4	
3	Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	64	

Sumber : hasil Survey